

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PENGESAHAN	
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	li
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Kerangka Konseptual.....	8
F. Kerangka Teori.....	11
1. Teori Keadilan sebagai <i>Grand Theory</i>	12
2. Teori Sistem Hukum sebagai <i>Middle Theory</i>	29
3. Teori Hukum Progresif sebagai <i>Middle Theory</i>	31
4. Teori Kewenangan sebagai <i>Applied Theory</i>	35
5. Teori Bekerjanya Hukum sebagai <i>Applied Theory</i>	41
G. Kerangka Pemikiran.....	43
H. Metode Penelitian.....	44
1. Paradigma Penelitian.....	44
2. Jenis Penelitian.....	46
3. Metode Pendekatan.....	49
4. Sumber Data Penelitian.....	51
5. Teknik Pengumpulan Data.....	59
6. Analisis Data.....	61
I. Originalitas Penelitian.....	63
J. Sistematika Penulisan Disertasi.....	69
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	71
A. Perlindungan Konsumen.....	71
B. Konsumen dan Pelaku Usaha.....	83
C. Lembaga-Lembaga terkait Perlindungan Konsumen menurut	

UUPK.....	115
D. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.....	132
E. Sengketa Konsumen.....	146
F. Penyelesaian Sengketa Konsumen di Luar Pengadilan.....	152
G. Tahapan Penyelesaian Sengketa dalam Konsep Islam.....	174
BAB III KONSTRUKSI KEWENANGAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DI INDONESIA PADA SAAT INI.....	176
A. Pengaturan Kewenangan BPSK dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen.....	176
1. Kewenangan Menerima Permohonan Penyelesaian Sengketa Konsumen.....	180
2. Kewenangan Memeriksa dan Menyelesaikan Sengketa Konsumen.....	187
3. Kewenangan Memutus dan Menetapkan Ada atau Tidaknya Kerugian di Pihak Konsumen.....	197
4. Kewenangan Menjatuhkan Sanksi Administrasi kepada Pelaku Usaha yang Melanggar Ketentuan Undang- Undang Perlindungan Konsumen.....	199
B. Pelaksanaan Kewenangan BPSK dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen.....	202
1. Pelaksanaan Kewenangan Menerima Permohonan Penyelesaian Sengketa Konsumen.....	202
2. Pelaksanaan Kewenangan Menyelesaikan Sengketa Konsumen.....	205
3. Pelaksanaan Kewenangan Memutus dan Menetapkan Ada atau Tidaknya kerugian di Pihak Konsumen.....	229
4. Pelaksanaan Kewenangan Menjatuhkan Sanksi Administrasi kepada Pelaku Usaha yang Melanggar Ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.....	249

BAB IV	FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB LEMAHNYA KEWENANGAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DI INDONESIA.....	254
	A. Substansi Hukum.....	255
	B. Struktur Hukum.....	288
	C. Budaya Hukum.....	309
BAB V	REKONSTRUKSI IDEAL KEWENANGAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA KONSUMEN YANG BERBASIS NILAI KEADILAN.....	325
	A. Praktek Penyelesaian Sengketa Konsumen di Luar Pengadilan pada Negara Lain.....	325
	1. Singapura.....	325
	2. Australia.....	334
	3. Analisis Perbandingan Penyelesaian Sengketa Konsumen melalui Luar Pengadilan di Beberapa Negara dengan Indonesia.....	337
	4. Relevansi Konsep <i>Small Claims Court</i> dan <i>Small Claims Tribunal</i> terhadap Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen saat ini di Indonesia.....	339
	B. Rekonstruksi Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam Menyelesaikan Sengketa Konsumen yang Berbasis Nilai Keadilan.....	343
	1. Rekonstruksi Nilai.....	343
	2. Rekonstruksi Norma.....	349
	3. Konsep Teori.....	364
BAB VI	PENUTUP.....	366
	A. Kesimpulan.....	366
	B. Saran.....	368
	C. Implementasi Kajian Disertasi.....	368

DAFTAR PUSTAKA